



Sikat Mafia Perizinan

PONTIANAK - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Hendrikus Adam mengapresiasi kinerja KPK mengungkap dan menindak tegas pelaku korupsi gratifikasi terkait perizinan hak guna usaha (HGU) di Kalimantan Barat. Menurutnya, mafia perizinan harus ditindak tegas.

"Sudah semestinya para mafia berdasi segera ditin-

dak tegas. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparaturnya terkait HGU ini memberi isyarat bahwa praktik buruk aparaturnya terkait perizinan dalam sektor tatakelola sumber daya alam selama ini perlu terus diawasi publik," ungkapnya, Sabtu (30/11).

Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Sikat Mafia Perizinan

Sambungan dari halaman 1

tersangka terhadap Gusmin Tuarita, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar periode 2012-2016 dan Siswidodo, Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kalbar. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penerimaan gratifikasi senilai Rp22,23 miliar terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalbar.

"Di sini kita jelas mengecam, menyayangkan, sekaligus meminta agar cara-cara seperti yang dilakukan dua pejabat BPN tersebut segera disudahi serta ditindak tegas. Karena secara tidak langsung keduanya telah melukai perasaan rakyat Kalbar dan mengingkari janji sumpah jabatan yang dipercayakan," jelasnya.

Adam menilai lemahnya penegakan hukum atas praktik buruk sejumlah korporasi

selama ini membuat oknum aparaturnya berani bermain atau bersekutu dengan pemodal dalam menyalahgunakan kewenangan. Kondisi ini termasuk dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus menjadi korban.

Penerbitan izin, kata dia, seharusnya bisa berjalan sesuai prosedur dan tidak menjadi suatu hal yang diperumit. Penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan izin HGU dinilai punya dua sisi dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Bagi pemodal yang mengamini dan mau mengikuti proses transaksi dengan biaya tinggi, tentu bukan masalah karena pasti sudah dihitung untung maupun ruginya. Artinya bisa jadi mengeluarkan uang untuk mendapatkan HGU bagi mereka tidak masalah. Tetapi bagi yang ingin men-

jalankan usaha dengan niat baik melalui perizinan secara prosedural pasti akan melibatkannya sebagai penghambat," paparnya.

Dampak jangka panjangnya, kata Adam, masalah-masalah lain rentan muncul, seperti penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara sepihak yang sulit disentuh penegak hukum. Sementara masyarakat akan selalu menjadi korban ketidakadilan. Pada sisi lain, kerusakan lingkungan rentan terjadi. Demikian pula risiko kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan haknya.

"Yang jelas, secara umum praktik penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin melukai hati dan merugikan kita sebagai rakyat. Dalam kasus ini terjadi situasi di mana birokrasi yang harusnya dapat melayani rakyat, tapi malah dikorupsi," timpalnya.

Kasus ini mengisyarat-

kan bahwa perlu ada atensi serius penegak hukum, termasuk pemerintah daerah dalam memastikan aparaturnya atau unit kerjanya bersih dari praktik mafia perizinan. "Gebrakan penegak hukum, maupun Gubernur Kalbar dalam memutus rantai korupsi sektor sumber daya alam sangat kita harapkan," pungkasnya.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar juga mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terkait kasus gratifikasi proses pendaftaran tanah di Kalbar. Dalam kasus yang diungkapkan KPK itu juga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi untuk penerbitan HGU pada sejumlah perkebunan kelapa sawit. "Gapki mendukung proses penegakan hukum," kata Humas Gapki Kalbar Mufti Huda di Pontianak, kemarin. (sig/mse)